

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ani Sri Rahayu, 2022, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang
- Busrizalti. 2013, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Kusmanto. dkk, 1992, *Hukum Keuangan Negara*, Yogyakarta: Intermedia.
- Hamid Darmadi dkk. 2018. *Pengantar Pendidikan (Suatu Konsep Dasar, Teori Strategi, dan Implementasi)*, Bandung: Alfabeta, cv.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. 1959. *The Motivation to Work (2nd ed.)*. New York: John Wiley & Sons
- Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Miftah Thoha. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Rivai. 2011. *Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rulam Ahmadi. 2017. *Pengantar Pendidikan: Asas & Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sinyo Harry Sarundajang. 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka SinarHarapan.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Marwan, Jimmy. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya :RealityPublisher.

B. PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honoror menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak.

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-889-2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022).

United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 7.

C. SKRIPSI

Aditia Restianida. 2018. *“Pelaksanaan Asas Pembagian Habis Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat”*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Rahimul Wiqi Supriadi. 2021. *“Penggangkatan dan Pemberian Gaji Guru Honorer di Sekolah Negeri di Kota Padang,”* Skripsi Sarjana Universitas Andalas. Padang.

D. JURNAL

Abdul Rokhim. 2013. “Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang*, Vol. XIX: 36.

Anwar, K. (2019). Problematika Guru Honorer di Indonesia: Studi Kasus di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 200-215.

Bjork, C. 2005. Indonesian education: Teachers, schools, and central bureaucracy. *Routledge*.

Chan, J. L. (2003). Government accounting: an assessment of theory, purposes and standards. *Public Money & Management*, 23(1), 13-20.

Dicky Agus Saputro, dkk, 2011. “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, *Jurnal Universitas Brawijaya*.

Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional development in an era of reform. *Phi delta kappan*, 76(8), 597-604.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement. *Education policy analysis archives*, 8, 1.

Guthrie, J., Olson, O., & Humphrey, C. (1999). Debating developments in new public financial management: the limits of global theorising and some new ways forward.

Heeks, R. (2002). Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations. *The information society*, 18(2), 101-112.

Hood, C. (2010). Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple?. *West European Politics*, 33(5), 989-1009.

Hilmi Fauz dan Djunawir Syafar. 2017. *“Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta”*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 2.

- Heinrich, C. J. 2002. Outcomes-based performance management in the public sector: implications for government accountability and effectiveness. *Public administration review*, 62(6), 712-725.
- Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review. *Psychological bulletin*, 127(3), 376.
- Novendra Hidayat. 2016. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan", *Jurnal Society*, Vol.VI:I.
- Odden, A. R., & Kelley, C. 2002. Paying teachers for what they know and do: New and smarter compensation strategies to improve schools. *Corwin Press*.
- OECD. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. *OECD Publishing*.
- Putri, A. (2020). Disparitas Honorarium Guru Honorer: Studi Kasus di Kota Padang. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 150-165.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306-323.
- Septi Nur Wijayanti. 2016. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23 No.2.
- Suyanto, S. (2018). Problematika Guru Honorer dalam Sistem Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 15-28.
- Tyler, T. R. (2000). Social justice: Outcome and procedure. *International journal of psychology*
- Wandi Arifin dan Ridwan Arifin. 2019. "Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum", *Riau Law Journal*, Vol. 3, No.1.

E. INTERNET

- Aris Kurniawan, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli* (On-Line), tersedia di <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara/>
- Jpnn.com, "Nadiem Akui Masalah Guru Honorer Muncul Karena Pemerintah Belum Bisa Kejar Target", <https://www.jpnn.com/news/nadiem-akui-masalah-guru-honorer-muncul-karena-pemerintah-belum-bisa-kejar-target>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 14:35 WIB.
- Gaji Guru Honorer Menurut Peraturan Perundang-undangan, <https://glints.com/id/lowongan/gaji-guru-honorer/>

Hukum Online, *Status Dan Gaji Guru Honorer*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d59d47d249a/status-dan-gaji-pegawaihonorer/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 15.30 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru>

Monita, “Pemeriksaan Terhadap Urusan Pemerintahan Di Daerah”, <http://inspektorat.sumbarprov.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024, pukul 00.17 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Honorarium”, (<https://kbbi.id/honorarium> diakses pada tanggal 22 oktober 2023 pukul 17.34 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bayar”, (<https://kbbi.web.id/bayar> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 13:42 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bayar”, (<https://kbbi.web.id/bayar> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 13:42 WIB)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Daerah* (On-Line), tersedia di <https://kbbi.web.id/daerah> (29 Oktober 2020)

UMP Sumbar Tahun 2022 Sebesar Rp 2,5 Jutaan”, (<https://padang.go.id/ump-sumbar-tahun-2022-sebesar-rp-25-jutaan>), diakses pada tanggal 22 Januari, pukul 00.15 WIB.

F. ARTIKEL

Nafisakhatul Layliyah. 2019., “*Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*”, Artikel Research Gate.

